

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni,
- Amiruddin & Zainal Asikim, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta, Sinar Grafika,
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Bambang Waluyo, 2007, *Pidana dan Pemidanaan, I*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group,
- Chaeruddin, et al, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditaa,
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Jakarta, Solusi Publishing,
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, RajaGrafindo,
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- IGM Nurdjana. 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi; "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum:.* Yogyakarta Pustaka Pelajar,
- Kurniawan G Carisudin, Et. Al, 2003. *Mengungkap Korupsi di Daerah*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch,

- Leden Marpaung, 2001, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Bandung, PT. Alumni,
- Mahmud Kusuma, 2009, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP,
- Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadia Group,
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Pompe, 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
- R Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung, Mandar Maju,
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenamadia Group,
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali"*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-089/F/Fpk.3/01/1995 tentang Pengaturan Hasil Pembayaran Uang Pengganti

Surat Edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se-Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

C. JURNAL, MAKALAH DAN ARTIKEL

Harprileny Soebiantoro, 2004. Makalah : *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta. Media Hukum

Romli Atmasasmita, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*, Paper, Jakarta, 2006, hlm. 1 dan Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Melawan Kejahatan Korporasi di Indonesia: Membentuk Ius Constituendum Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Paper, Jakarta, 2006

Yadyn, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (www.pasca.unhas.ac.id), diakses pada 26 Maret 2016



